Faktor *Constraints* dan *Incentives* dalam Kebijakan India Meratifikasi Additional Protocol IAEA

Garnis Yoga Pratama Nugraha Prawihatsari

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari adanya fakta bahwa India merupakan negara yang mengembangkan nuklir sejak awal kemerdekaannya. Pengembangan nuklir ini difungsikan sebagai upaya pemenuhan kepentingan nasional India utamanya dibidang keamanan nasional dan juga prestise. Dalam perkembangan nuklirnya, India acapkali menolak adanya campur tangan dari pihak lain terhadap perkembangan nuklirnya. Hal ini dibuktikan dengan ketidak-sediaan India untuk meratifikasi Non-Proliferation Treaty (NPT). Namun, pada tahun 2009 India menjadi satu-satunya negara yang menolak untuk meratifikasi NPT namun bersedia untuk meratifikasi Additional Protocol dengan IAEA. Penelitian ini kemudian menulusuri salah satu faktor yang melatar belakangi kejadian tersebut melalui pendekatan sistemik. Penulis memiliki argumen penelitian bahwa diratifikasinya Additional Protocol IAEA oleh India meskipun ia bukan merupakan negara anggota NPT dikarenakan adanya faktor constraints dan incentives yang bermuara pada pemenuhan kepentingan nasional.

Kata-kata kunci: *India, nuklir, Non-Proliferation Treaty (NPT), Additional Protocol, IAEA, faktor constraints, dan faktor incentives.*

This study begins from the fact that India as a nuclear-developing country since the early years of its independence. Such nuclear development functions as an effort of fulfilling the national interest, primarily in terms of national security as well as prestige. In its nuclear development, India often denies any interference from other parties towards its nuclear proliferation. This is supported by India's unwillingness in ratifying the Non-Proliferation Treaty (NPT). Nevertheless, in 2009, India becomes the only country which refuses to ratify the NPT, but is willing ratify the Additional Protocol of IAEA. This study examines one of the factors behind such occurrence using systemic approach. The write has arguments that the ratification of the Additional Protocol of IAEA by India, though the country is not a member of NPT, is due to constraints and incentives factors leading to the fulfillment of national interests.

Key words: India, nuclear, *Non-Proliferation Treaty (NPT), Additional Protocol, IAEA, constraints factors, incentives factors.*

India menjadi salah satu negara yang tidak meratifikasi NPT. Pada tahun 1996, ketika Perdana Menteri Kanada melakukan kunjungan ke India untuk membujuk India menandatangani NPT, Perdana Menteri India saat itu P.V Narasimha Rao menyatakan, *"Until now, Indian officials have refused to sign the treaty, which discriminates between countries with nuclear power and those without*".[1] Sikap demikian ternyata berlanjut, bahkan hingga Juli 2016 Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj masih menyatakan hal yang sama:

> "We have clear cut policy in this regard. We got waiver [at the NSG in 2008] without becoming member of the NPT. I want to announce from this platform, that we will never sign into the NPT but we will maintain our commitment [pratibadhata] to the NPT"[2].

Runa Das[3] , seorang cendikiawan terkemuka, dalam tulisannya yang berjudul "State, Identity and Representations of Nuclear (in) Securities in India and Pakistan" (2010), menjelaskan bahwa alasan India tidak meratifikasi perjanjian ini karena India menganggap NPT diskriminatif, tidak universal dan tidak mengikat semua negara. Artinya, menurut Das, bahwa bagi India NPT yang seharusnya bersifat netral memberlakukan segala aturan pelarangan penggunaan senjata nuklir ke semua negara tanpa terkecuali. Sedangkan dalam NPT tersebut dituliskan bahwa terdapat lima negara yang diperbolehkan perjanjian ini untuk memiliki senjata nuklir, yaitu yang dikenal dengan *Nuclear Weapon States* (NWS). Sedangkan negara sisanya dikenal dengan *Non-Nuclear Weapon States* (NNWS).[4] Pernyataan demikian, bagi India menunjukkan tidak meratanya hak yang diberikan bagi semua negara, sebagaimana hanya terdapat lima negara yang boleh memiliki senjata nuklir.[5]

Di tahun 1990, International Atomic Energi Agency (IAEA) mengembangkan Model Additional Protocol (INFCIRC/540) untuk memperkuat sistem pengamanan NNWS di bawah NPT. Model Additional Protocol merupakan dokumen yang memberikan kewenangan kepada IAEA untuk memverifikasi *safeguard obligations*[6] sebuah negara, juga untuk melengkapi IAEA Safeguards Agreement.[7] Tujuan utamanya adalah memperluas jangkauan informasi tentang kegiatan nuklir untuk kepentingan damai, yang kemudian dipantau dan dilaporkan oleh IAEA. Sedangkan NWS yang meratifikasi NPT menegosiasikan perjanjian Additional Protocol sendiri dengan IAEA dimana tingkat akses yang ditawarkan kepada IAEA untuk inspeksi berbeda setiap negara dan jauh lebih terbatas dibandingkan dengan Model Additional Protocol.[8]

---

[1] United Press International, Inc. "Canada tells India: Sign Nuclear Treaty" [daring]. dalam http://upi.com [diakses pada April 2017], 1996.
[2] Kallol Bhattacharjee. "India will never sign NPT, says Sushma Swaraj" [daring] dalam http://thehindu.com [diakses pada Maret 2017], 2016.
[3] Runa Das. "State, Identity and Representations of Nuclear (In) Securities in India and Pakistan". Dalam *Journal of Asian and African Studies*, 2010, hlm. 3
[4] United Nations. "NPT Treaty" [pdf]. dalam http://un.org [diakses pada Maret 2017].
[5] Weiss, op.cit., hlm. 258
[6] *Safeguard obligations* merupakan serangkaian langkah-langkah teknis yang disetujui oleh negara untuk menghormati kewajiban hukum internasional untuk menggunakan bahan nuklir hanya untuk tujuan damai.
[7] IAEA. *Additional Protocol* [daring]. dalam http://iaea.org [diakses pada Maret 2017]
[8] International Panel on Fissile Materials. "India Ratifies an Additional Protocol and Will Safeguard Two More Nuclear Power Reactors" [daring]. dalam http://fissilematerials.org [diakses pada 10 Maret 2017], 2014.

Dijelaskan oleh Theodore Hirsch dalam tulisannya berjudul "The IAEA Additional Protocol: What it is and Why It Matters"[9], perbedaan antara keduanya adalah bahwa untuk Model Additional Protocol wajib diratifikasi oleh negara-negara yang menyepakati Comprehensive Safeguards Agreements (CSAS), sedangkan untuk Additional Protocol sendiri diratifikasi oleh negara-negara tertentu dengan perjanjian atau penawaran khusus. Sehingga, konten dari Additional Protocol setiap negara berbeda tergantung kebutuhan dan kesepakatan antara IAEA dengan negara yang bersangkutan.

Menurut data yang diberikan IAEA[10], sampai Maret 2016, 128 Additional Protocol diratifikasi dan mulai diberlakukan di 127 negara dan Euratom. Selebihnya terdapat 19 negara yang sudah meratifikasi Additional Protocol namun belum melaksanakan ketentuan-ketentuannya. Di bawah Additional Protocol ini, hak IAEA diperluas, terutama dalam rangka mengakses informasi dan situs suatu negara yang berkaitan dengan pengembangan nuklirnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengisi kesenjangan dalam informasi yang dilaporkan di bawah CSAS dengan mengijinkan IAEA untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dari program, rencana, kepemilikan, dan perdagangan nuklir sebuah negara. Di samping itu Additional Protocol ini juga memberikan jaminan yang lebih besar kepada NNWS yang bersangkutan untuk melaporkan kegiatan dan status bahan nuklirnya.[11]

Pada tanggal 25 Juli 2014, India sebagai negara yang tidak meratifikasi NPT justru mulai memberlakukan Additional Protocol IAEA di negaranya. Hal ini menjadi sebuah keunikan sendiri mengingat dari lima negara yang tidak meratifikasi NPT, yaitu Israel, Korea Utara, Pakistan, Sudan Selatan dan India sendiri, India menjadi satu-satunya negara yang justru meratifikasi Additional Protocol IAEA**.** Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri India pada 2014:

> "Let me confirm to you that the government has decided to ratify the additional protocol to Indian specific safeguard agreement. We had signed this earlier, what we have decided is to take next step of ratification. This is a signal of our commitment to abide by our international obligations".[12]

Dengan demikian, berdasarkan sikap baru India tersebut, sejak itu IAEA memiliki akses terhadap fasilitasi nuklir sipil India. Meskipun protokol tambahan ini belum mencakup keseluruhan ketentuan dari NPT tetapi terdapat tanda-tanda perubahan orientasi India akibat terbukanya India terhadap upaya nonproliferasi nuklir.[13] Di sisi lain, terdapat sebuah fakta bahwa penandatanganan ini merupakan bukti komitmen India yang dijanjikan pada saat kesepakatan bersama Indo-US pada Juli 2005. Dokumen dari pertemuan tersebut dituangkan dalam *Implementation of the India-US Joint Statement of July 18, 2005: India's Separation Plan*[14]*,* yang pada poin ketiganya berbunyi:

---

[9] Theodore Hirsch. "The IAEA Additional Protocol: Why It Is and Why It Matters" dalam *The Nonproliferation Review Fall-Winter*, 2004, hlm. 141.
[10] IAEA, op.cit.
[11] *Ibid*
[12] The Indian Express . "Nuclear Deal: India to Ratify Additional Protocol to Indian Specific Safeguard Agreement" [daring]. dalam http://indianexpress.com [diakses pada 10 Maret 2017], 2014.
[13] Aabha Dixit. "India's Additional Protocol Enters into Force". IAEA [daring]. Dalam http://iaea.org [diakses pada 28 Februari 2017], 2014.
[14] NTI. "Implementation of the India-US Joint Statement of July 18, 2005: India's Separation Plan" [pdf]. Dalam http://nti.org [diakses pada Maret 2017], 2005.

> Accordingly, India for its part undertook the following commitments: identifying and separating civilian and military nuclear facilities and programmes in a phased manner.; filing a declaration regarding its civilian facilities with the IAEA; taking a decision to place voluntarily its civilian nuclear facilities under IAEA safeguards; and signing and adhering to an Additional Protocol with respect to civilian nuclear facilities.

Secara terperinci, tanggung jawab dan praktik ini meliputi: (a) identifikasi dan pemisahan fasilitas dan program nuklir sipil dan militer secara bertahap, dan menyampaikan laporan mengenai fasilitas sipilnya kepada IAEA; (b) secara sukarela bersedia menempatkan fasilitas nuklir sipilnya di bawah pengawasan IAEA; (c) menandatangani dan mengikuti Additional Protocol berkenaan dengan fasilitas nuklir sipil; (d) melanjutkan moratorium unilateral India untuk pengujian senjata nuklir; (e) bekerjasama dengan Amerika Serikat di bawah Multilateral Fissile Material Cut Off Treaty; dan (f) memastikan bahwa India bersedia mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamankan bahan maupun teknologi nuklirnya melalui *comprehensive export control legislation* dan melakukan harmonisasi serta patuh terhadap pedoman Missile Technology Control Regime (MTCR) dan Nuclear Suppliers Group (NSG).[15]

Kebijakan Pengembangan Nuklir India dan Additional Protocol IAEA

Dalam sebuah artikel berjudul "India's Atomic Energi Programme—Past and Future", dituliskan bahwa India termasuk satu-satunya negara berkembang di antara tujuh atau delapan negara di dunia yang memiliki siklus bahan bakar yang lengkap, langsung dari eksplorasi, pertambangan, ekstrasi, dan konversi uranium; melalui pembuatan bahan bakar, produksi reaktor, hingga pengolahan ulang limbah.[16] Keberhasilan India ini bukanlah sesuatu yang dicapai dengan singkat. India memiliki ketertarikan yang kuat terhadap energi nuklir bahkan sebelum negara tersebut merdeka.[17] Bagi negaranya sendiri, kepemilikan nuklir difokuskan untuk tujuan konstruktif sebagai upaya mensejahterakan warga negaranya[18], sesuai dengan pernyataan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru di tahun 1946,

> "I have no doubt India will develop her scientific researches and I hope Indian scientists will use the atomic force for constructive purposes. But if India is threatened, she will inevitably try to defend herself by all means at her disposal."[19]

Untuk melihat perkembangan nuklir India tersebut secara garis besar, dapat dilihat melalui bagan di bawah ini

---

[15] *Nuclear Supplier Group* adalah kelompok negara pemasok nuklir yang berusaha mencegah proliferasi nuklir dengan mengendalikan ekspor bahan, peralatan, dan teknologi yang dapat digunakan untuk memproduksi senjata nuklir [Nuclear Suppliers Group. t.t About. Dalam http://nuclearsuppliersgroup.org]

[16] Sethna, op.cit., hlm. 5

[17] George Perkovich. *India's Nuclear Bomb: The Impact on Global Proliferation*. University of California Press, 1999, hlm. 290

[18] B.M. Udgaonkar. *India's Nuclear Capability, Her Security Concerns and the Recent Tests.* Indian Academy of Sciences,1999, hlm. 411

[19] *Ibid*

Bagan I: Perkembangan Kebijakan Nuklir India

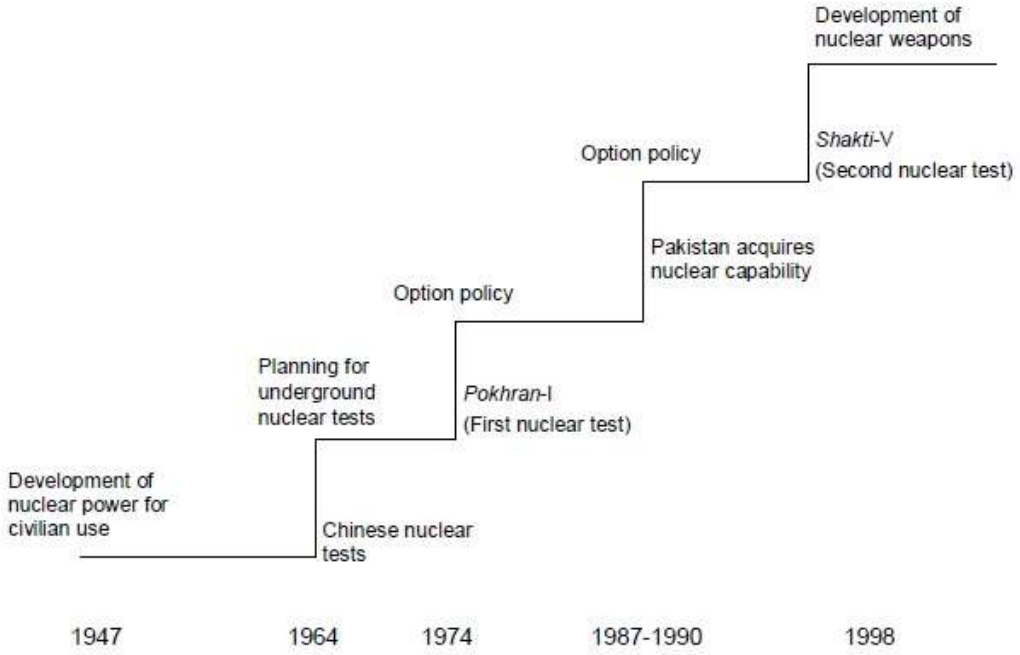

Sumber: India's Emerging Nuclear Posture, 2001.

Kesuksesan nuklir India diawali oleh pemikiran Bhabha yang melihat energi nuklir sebagai alat untuk mempercepat proses pembangunan dengan menyalip cara kerja teknologi yang usang. Walaupun penggunaan nuklir diutamakan untuk teknologi dan kepentingan rakyatnya, namun Bhabha turut mempertimbangkan penggunaan nuklir sebagai senjata militer.[20] Di tahun 1948 Bhabha mendesak Nehru untuk mengajukan *Atomic Energi Bill*, yang kemudian menjadi *Atomic Energi Act*.[21] Hal ini kemudian menjadi dasar pembentukan Atomic Energi Comission yang mengurusi dan mengawasi pengembangan nuklir India.[22] Dalam proses pengembangan nuklir India tersebut, Dr. Homi Bhabha sempat menyatakan bahwa dalam beberapa dekade ke depan, ketika India berhasil mengembangkan nuklirnya dengan baik, maka India mampu menjadi negara berbasis kekuatan nuklir yang besar di dunia.[23], *"when nuclear energi has been successfully applied for power production in say, a couple decades from now, India will not have to look abroad for it's expert but will find the read at hand".*

Di tahun 1962, India mengalami kekalahan telak dalam perang melawan Sino. Hal ini kemudian berdampak pada persepsi keamanan India. Sehingga, India kemudian melihat Tiongkok sebagai ancaman regional. Akibat dari signifikansi Tiongkok tersebut maka muncul faktor ketidaknyamanan dan keresahan yang menjadi konsiderasi para pengambil kebijakan di India untuk semakin memperkuat instalasai nuklirnya. Oleh karena itu di tahun yang sama, pemerintah India mengajukan *Atomic Energy Bill* kepada parlemen. Bill tersebut berisi tentang rancangan pengembangan nuklir India guna kepentingan militer, yang kemudian disahkan dan disetujui oleh parlemen maupun pemerintah India di tahun 1964 bersamaan dengan uji coba

[20] Stephen Cohen dan Sunil Dasgupta."The Reluctant of Nuclear Power" dalam *Arming Without Aiming: India's Military Modernization*. Massachusetts: The Brooking Institutes, 1999, hlm. 165
[21] Undang-Undang yang berisi peraturan tentang pengembangan, kontrol, dan penggunaan energi atom untuk kesejahteraan rakyat India dan untuk tujuan damai lainnya (dijelaskan oleh FAO, t.t. dalam http://fao.org).
[22] Weiss, loc.cit.
[23] Sethna, op.cit., hlm. 7

nuklir Tiongkok yang pertama.[24] Sejak saat itu, faktor keamanan nasional menjadi salah satu kepentingan nasional India yang dianggap vital.[25]

Uji coba nuklir akhirnya dilakukan pada tahun 1974 dengan menggunakan istilah "*Peaceful Nuclear Explosion*" dikarenakan India masih belum percaya diri dengan kemampuan senjata nuklirnya. Akibat uji coba nuklir ini, Amerika Serikat bersama negara-negara Barat lainnya memberlakukan sanksi dan pembatasan sebagaimana yang diatur dalam NPT. Bahkan Uni Soviet sempat membatasi diri dari India.[26] Penghentian perdagangan material nuklir kepada India dilakukan sebagai bentuk respon oleh Amerika Serikat karena uji coba nuklir tersebut menggunakan *heavy water* hasil Atoms For Peace Programme.[27]Di kisaran tahun 1990, Amerika Serikat terus-terusan memaksa India untuk menjadi negara non proliferasi. Amerika Serikat kemudian dengan semangat mengajak semua negara untuk meratifikasi CTBT, termasuk India, sebagai bentuk kelanjutan dari NPT. Namun pada 20 Juni 1996, duta besar India, Arundhati Ghose menolak untuk meratifikasi CTBT karena membahayakan keamanan nasional India.[28] Mendapatkan reaksi yang cukup keras dari dunia internasional, justru membuat India semakin mengembangkan nuklirnya. Hal ini didukung oleh kemenangan Bharatiya Janata Party (BJP) yang memang mendukung segala kegiatan senjata nuklir India. Setelah terpilihnya BJP ini, di tahun 1998 India melakukan lima uji coba nuklir sekaligus yang mengejutkan bagi Amerika Serikat dan juga negara belahan dunia lainnya.[29] Uji coba nuklir ini kemudian menjadi penanda ketetapan India untuk menjadi *Nuclear Weapon States*.[30]

Kebijakan proliferasi nuklir India juga tercermin dari India's Nuclear Doctrine yang telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali diumumkan pada Agustus 1999. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa doktrin tahun 1999 menyarankan sebuah doktrin nuklir. Dimana doktrin ini berdasarkan pada kekuatan minimum yang tidak ditentukan namun terpercaya dan dapat dipertahankan. Selain itu, India ditegaskan tidak akan menggunakan senjta nuklir terlebih dahulu, atau yang lebih dikenal dengan kebijakan *No First Use* (NFU), dan tidak akan menggunakan senjata nuklir untuk melawan negara-negara non-nuklir atau *Negative Security Assurance* (NSA).[31] Doktrin ini juga menekankan perlunya kontrol politik yang ketat terhadap kekuatan nuklir. Akhirnya pada Januari 2003, pemerintah India mengeluarkan *brief press statement* yang kemudian diakui sebagai doktrin nuklir India yang sah. Secara garis besar *brief press statement* yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tidak jauh berbeda dengan doktrin yang dikeluarkan oleh NSAB pada tahun 1999. Hanya ada beberapa penambahan, seperti memperkenalkan gagasan tentang pembalasan besar-besaran terhadap serangan nuklir ke India dan juga penjelasan lebih lanjut mengenai NFU. Dimana India mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir apabila terdapat serangan besar-besaran ataupun serangan melalui *chemical or biological weapons* (CBW).[32]

Selama beberapa dekade terakhir, India memfokuskan kebijakan nuklirnya untuk mendukung perlucutan senjata nuklir dibandingkan dengan non-proliferasi nuklir. Selain itu India juga

---

[24] Shures Danda. *Nuclear Weapon Programmes of India and Pakistan: A Comparative Assesment* dalam South Asian Survey, 2010, hlm. 44
[25] Sethna, op.cit., hlm. 10
[26] Cohen dan Dasgupta, op.cit., hlm. 173
[27] Weiss, op.cit., hlm. 272
[28] Cohen dan Dasgupta, op.cit., hlm. 199
[29] Tallbot. *Engaging India; Diplomacy, Democracy, and the Bomb*. Brookings Institution Press, 2004, hlm. 14
[30] *Ibid*
[31] Colonel Gurmeet Kanwal. "India's Nuclear Doctrine and Policy" [daring]. dalam http://idsa-india.org [diakses pada Juni 2017].
[32] Arms Control Association. "India's Draft Nuclear Doctrine" [daring]. dalam http://armscontrol.org [diakses pada Juni 2017].

tidak akan menggunakan nuklirnya untuk menyerang negara non-nuklir.[33] Adanya kebijakan nuklir yang dikeluarkan India dapat dimanifestasikan sebagai sebuah upaya perwujudan kepentingan nasionalnya, terutama dalam hal keamanan nasional. Dalam rangka pertahanan nasionalnya, dijelaskan oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), India terus memperluas dan meningkatkan kecanggihan gudang senjata nuklirnya. Hal ini salah satunya dikarenakan strategi dan perkembangan nuklir Pakistan yang juga cukup pesat hingga membuat India menyadari bahwa potensi ancaman di regional Asia Selatan begitu mengkhawatirkan. India terus meningkatkan anggaran pertahanannya secara signifikan sebagai bentuk konsistensinya untuk melindungi keamanan nasional negaranya. Menurut SIPRI ditahun 2005-2006 alokasi anggaran pertahanan India sekitar 20,52 miliar dolar Amerika Serikat. Menjadi 37,58 miliar dolar di tahun 2008-2009 serta meningkat lagi di tahun 2011-2012 sekitar 46 miliar dolar. Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata India yang terkait dengan Departemen Pertahanan Lainnya, seperti Riset Pertahanan dan Pengembangan Organisasi dan pabrik alat-alat pertahanan, termasuk pengeluaran untuk tanah, rumah, dan akomodasi tentara.[34] Kekuatan militer India tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan, keamanan nasional, dan keutuhan wilayahnya serta menjaga keamanan di Asia Selatan.[35]

Berikutnya adalah berdasarkan kebijakan nuklir India sendiri. Seperti yang dijelaskan di atas, pada Agustus 1999, India menerbitkan India's Nuclear Doctrine yang dirancang oleh Dewan Penasehat Keamanan Nasional yang belum diotorisasi sebagai dokumen resmi pemerintah.[36] Alasan mengapa doktrin ini masih dalam bentuk draft antara lain bisa dilihat dari kritik yang datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi, India tetap mempertahankan draft doktrin nuklirnya ini atas dasar pemenuhan kepentingan nasionalnya untuk menjaga keamanan nasionalnya melalui pengembangan senjata nuklir. Di dalam doktrin ini dituliskan mengenai "*credible minimum nuclear deterrence.*[37] yang bertujuan untuk tidak menghambat penelitian dan pengembangan nuklir India.[38] Doktrin ini menjelaskan bahwa tujuan pengembangan senjata nuklir ini bukan untuk menyerang negara lain, melainkan upaya pencegahan apabila India diserang. Sehingga India tidak akan memulai melakukan serangan nuklir apapun.[39]

Selain atas dasar keamanan nasional, kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh India adalah prestise. Seperti yang dituliskan Barry O'Neil[40] dalam tulisannya yang berjudul "Nuclear Weapons and National Prestige", bahwa suatu negara dengan kekuatan nuklir mengejar prestise yang bertujuan untuk mengungkapkan kecakapan teknis, kemajuan dan modernitas, yang menunjukkan bahwa negara tersebut layak dan patut diperhitungkan untuk berada dalam sistem internasional.[41] Dibuktikan dengan uji coba nuklir India di tahun 1974 yang diharapkan

---

[33] Rajagopalan, op.cit., hlm. 103
[34] Artileri."Anggaran Pertaganan India" [daring]. dalam http://artileri.org [diakses Mei 2017], 2015.
[35] Artileri."Primadona Pasar Militer Global India' [daring]. dalam http://artileri.org [diakses pada Mei 2017], 2012.
[36] Izuyama Marie dan Ogawa Shinichi. "The Nuclear Policy of India and Pakistan" dalam *NIDS Security Report No. 4 March 2003*. The National Institute for Defense Studies, 2003, hlm. 18
[37] Credible Minimum Nuclear Deterrence merupakan prinsip yang digunakan dalam Doktrin Nuklir India yang mengutamakan kebijakan "No First Use" dengan kemampuan untuk melakukan serangan kedua, dan hal tersebut berada di bawah batas minimal pencegahan nuklir sebagai pertentangan tergadap konsep *mutually assured destruction* dalam India's Nuclear Doctrine and Policy" dalam https://www.idsa-india.org/an-feb-1.01.htm [diakses Juni 2017].
[38] Marie dan Shinichi, op.cit., hlm 19
[39] "India's Nuclear Doctrine and Policy" dalam https://www.idsa-india.org/an-feb-1.01.htm [diakses Juni 2017].
[40] Barry O'Neill. "Nuclear Weapons and National Prestige". Department of Political Science. Bon University, 2003, hlm. 1
[41]. John W. Meyer. *The Changing Cultural Content of The Nation State* [pdf]. dalam http://jstor.org [diakses pada Juni 2017], 1999, hlm. 389

mampu meningkatkan prestise negaranya seperti yang telah dilakukan oleh Tiongkok maupun Perancis. Pun demikian di tahun 1998. Walaupun prestise bukan menjadi satu-satunya motiv, namun tetap saja prestise menyebabkan India tetap melakukan uji coba nuklir walaupun mengancam keamanan negara secara keseluruhan.[42] Bahkan, Abdul Kalam, Kepala Departemen Riset dan Pengembangan Pertahanan India mengungkapkan pendapatnya tentang uji coba nuklir di tahun 1998, *"India has got the size and weight to do it"*.

Pada tanggal 15 Mei 2009, India meratifikasi Additional Protocol IAEA. Di bawah Additional Protocol ini, hak IAEA diperluas, terutama dalam rangka mengakses informasi dan situs suatu negara yang berkaitan dengan pengembangan nuklirnya. Additional Protocol ini juga memberikan jaminan yang lebih besar kepada India yang bersangkutan untuk melaporkan kegiatan dan status bahan nuklirnya.[43] Hal ini menjadi sebuah keunikan sendiri mengingat dari lima negara yang tidak meratifikasi NPT, yaitu Israel, Korea Utara, Pakistan, Sudan Selatan dan India sendiri, India menjadi satu-satunya negara yang justru meratifikasi Additional Protocol IAEA**.** Secara singkat dapat dijelaskan baahwa Additional Protocol ini pada dasarnya untuk memastikan pengumpulan data ekspor India dan untuk menjamin bahwa bahan tersebut tidak dialihkan untuk penggunaan yang tidak sah. Additional Protocol ini berlaku bagi dua puluh fasilitas nuklir India yang mencakup Nuclear Fuel Complex di Hyderabad, Tarapur Atomic Power Plant, Rajasthan Atomic Power Station, dan The Kakrapar Atomic Power Station.[44] Additional Protocol yang berarti terdapat kesepakatan antara kedua negara maka terdapat beberapa bagian dari Model Additional Protocol yang dihapuskan. India hanya setuju untuk memberikan informasi mengenai ekspor terkait nuklir. Sedangkan informasi mengenai penelitian, pengembangan terkait siklus bahan bakar nuklir, impor nuklir dan penambangan uranium tidak dapat diakses IAEA.[45]

Constraints dan *Incentives* dalam Kebijakan India Meratifikasi Additional Protocol IAEA

Untuk menjelaskan mengapa sebuah negara bergabung dalam rezim atau organisasi internasional, Keohane[46] menggunakan teori *systemic constraint-choice analysis*. Analisis ini mengikuti tradisi teori mikroekonomi dengan memusatkan perhatian pada *constraints* (paksaan) dan *incentives* (dorongan) yang mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh aktor.[47] Berkaitan dengan faktor *constraints* tersebut, pada tanggal 18 Juli 2005 Presiden George W. Bush dan Perdana Menteri Manmohan Singh mengeluarkan sebuah *Joint Statement* yang berujung pada kewajiban India untuk meratifikasi Additional Protocol IAEA. Kesepakatan dua negara ini pada dasarnya bertujuan untuk membuat sebuah kemitraan global antara Amerika Serikat dan India melalui peningkatan kerjasama dalam berbagai isu, termasuk kerjasama penuh energi nuklir sipil.[48] Klausul ini dipandang secara luas sebagai pengakuan langsung atas status India sebagai negara dengan senjata nuklir. Sesuai dengan pernyataan Presiden George W. Bush,

---

[42] O'Neill, op.cit., hlm. 4
[43] *Ibid*
[44] Atul Aneja. "India Ratifies Additional Protocol, Decks Cleared for Nuclear Imports", 2014, hlm. 9
[45] Peter Crail. "IAEA Approves India Additional Protocol" dalam *Arms Control Today* [daring]. dalam http://armscontrol.org [diakses pada Mei 2017].
[46] Keohane, op.cit., hlm. 330
[47] Martin Shubik. "A Curmudgeon's Guide to Microeconomics" dalam *Journal of Economic Literature 8*. Cambridge: Cambridge University Press, 1970, hlm. 23
[48] White House Press Release, loc.cit.

> "as a responsible state with advanced nuclear technology, India should acquire the same benefits and advantages as other such states. So we will work on achieving full civilian nuclear energi cooperation with India."[49]

Dokumen dari pertemuan tersebut dituangkan dalam *Implementation of the India-US Joint Statement of July 18, 2005: India's Separation Plan*[50], yang pada poin ketiganya berbunyi:

> "Accordingly, India for its part undertook the following commitments: identifying and separating civilian and military nuclear facilities and programmes in a phased manner.; filing a declaration regarding its civilian facilities with the IAEA; taking a decision to place voluntarily its civilian nuclear facilities under IAEA safeguards; and signing and adhering to an Additional Protocol with respect to civilian nuclear facilities."

Perdana Menteri India, Manmohan Singh menanggapi hal tersebut dengan menyatakan:

> "India would reciprocally agree that it would be ready to assume the same responsibilities and practices and acquire the same benefits and advantages as other leading countries with advanced nuclear technology, such as the United States."[51]

Secara terperinci, tanggung jawab dan praktik ini meliputi: (a) identifikasi dan pemisahan fasilitas dan program nuklir sipil dan militer secara bertahap, dan menyampaikan laporan mengenai fasilitas sipilnya kepada IAEA; (b) secara sukarela bersedia menempatkan fasilitas nuklir sipilnya di bawah pengawasan IAEA; (c) menandatangani dan mengikuti Additional Protocol berkenaan dengan fasilitas nuklir sipil; (d) melanjutkan moratorium unilateral India untuk pengujian senjata nuklir; (e) bekerjasama dengan Amerika Serikat di bawah Multilateral Fissile Material Cut Off Treaty; dan (f) memastikan bahwa India bersedia mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamankan bahan maupun teknologi nuklirnya melalui *comprehensive export control legislation* dan melakukan harmonisasi serta patuh terhadap pedoman MTCR dan NSG.[52]

Senada dengan pernyataan Perdana Menteri Manmohan Singh, dalam India's Separation Plan dituliskan bahwa,

> The Joint Statement of 18 July 2005, recognized that India is ready to assume the same responsibilities and practices as other leading countries with advanced nuclear technology, such as the United States. India has an impeccable record in nonproliferation. The Joint Statement acknowledges that India's nuclear programme has both a military and a civilian component. Both sides had agreed that the purpose was not to constrain India's strategic programme but to enable resumption of full civil nuclear energi cooperation in order to enhance global energi and environmental security. Such cooperation was predicated on the assumption that any international civil nuclear energi cooperation (including by the US) offered to India in the civilian sector should, firstly, not be diverted away

---

[49] "Joint Statement Between President George W. Bush and Prime Minister Manmohan Singh", 18 Juli 2005 [daring]. dalam http://www.state.gov/p/sa/rls/pr/2005/49763.htm [diakses Juni 2017].

[50] NTI. "Implementation of the India-US Joint Statement of July 18, 2005: India's Separation Plan" [pdf]. Dalam http://nti.org [diakses pada Maret 2017], 2005.

[51] *Ibid*

[52] *Nuclear Supplier Group* adalah kelompok negara pemasok nuklir yang berusaha mencegah proliferasi nuklir dengan mengendalikan ekspor bahan, peralatan, dan teknologi yang dapat digunakan untuk memproduksi senjata nuklir [Nuclear Suppliers Group. t.t About. Dalam http://nuclearsuppliersgroup.org]

> from civilian purposes, and secondly, should not be transferred from India to third countries without safeguards. These concepts will be reflected in the Safeguards Agreement to be negotiated by India with IAEA[53].

Dimana secara singkat dapat dijelaskan bahwa India siap mengakui dan mengambil tanggung jawab seperti negara-negara terkemuka lainnya dengan teknologi nuklir yang maju, yang pada akhirnya India harus meratifikasi Additional Protocol IAEA.

Sedangkan faktor *incentives* sendiri dapat dilihat dari keuntungan yang didapatkan India.Dijelaskan oleh The Economist[54], salah satu keuntungan yang didapatkan oleh India ketika meratifikasi Additional Protocol ini adalah berakhirnya pemblokiran yang dilakukan oleh NSG terhadap India sejak uji coba nuklir yang dilakukan pada tahun 1974. Melalui penandatanganan Additional Protocol yang dilakukan India, 45 anggota NSG bersepakat untuk mencabut embargo perdagangan nuklir India dengan seluruh dunia.[55] Menteri Luar Negeri Pranab Mukerjee juga menyatakan bahwa dengan dibukanya embargo ini, India dapat menjalin kerjasama yang baik dengan negara-negara lain yang selama ini terbatas dikarenakan kepemilikan nuklir India,

> "The final outcome fully meets our expectations and is consistent with Government policy and the national consensus on disarmament and non-proliferation. We are looking forward to working with its international partners in realizing the full potential of mutually beneficial cooperation that the decision entails".[56]

Dijelaskan lebih lanjut bahwa melalui kebijakan ini, maka secara teknis membuka pintu bagi produsen reaktor dan uranium yaitu Rusia, Perancis, Kanada, dan Australia untuk bekerjasama dengan India. Prospek reaktor tipe Koodankulam yang dibantu oleh Rusia juga semakin mudah untuk diselesaikan. Debu C[57] dalam tulisannya yang berjudul "India's Bid for NSG" menjelaskan bahwa India memiliki komitmen untuk meningkatkan perkembangan pembangkit listriknya hingga 40%. Untuk mencapai hal ini, pembangkit tenaga nuklir harus kembali difokuskan. Oleh karenanya India memerlukan teknologi yang lebih canggih, efisien, dan murah seperti yang tersedia di negara Kanada, Jepang, Rusia dan Perancis. Tanpa hubungan yang baik dengan NSG, maka memungkinkan untuk melakukan pertukaran teknologi maju antara India dengan negara lainnya.

The Economist[58] kemudian menjelaskan lebih lanjut faktor *incentives* lainnya yang mendorong India untuk meratifikasi Additional Protocol IAEA adalah karena India ingin mengembangkan nuklirnya dengan luas, namun memiliki kendala kekurangan energi dan ketergantungannya pada impor bahan bakar fosil. Padahal, keadaan saat ini adalah sekitar sembilan belas reaktor bekerja, lima di bawah konstruksi dan setidaknya ada enam belas lebih direncanakan. Dalam prosesnya, India membutuhkan uranium impor sebagai bahan bakar, modal asing, dan keahlian

---

[53] NTI, loc.cit.
[54] The Economist. "India Ratifies, At Last, A Nuclear Deal with the IAEA" dalam *India's Nuclear Diplomacy* [daring]. dalam http://www.economist.com/news/asia/21605961-india-ratifies-last-nuclear-deal-iaea-late-addition [diakses pada November 2016], 2014
[55] The Hindu. "India Crosses A Nuclear Hurdle with NSG Waiver" dalam *The Hindu Business Line* [daring]. dalam http://www.thehindubusinessline.com/todays-paper/india-crosses-a-nuclear-hurdle-with- [diakses pada Juni 2017], 2008.
[56] *Ibid.*
[57] Debu C. 2016. "India's Bid for NSG" [daring]. dalam http://www.mapsofindia.com/my-india/government/what-is-nsg-and-why-india-is-seeking-its-membership [diakses Juni 2017].
[58] The Economist, loc.cit.

untuk membangun reaktor. Berkat adanya penandatanganan Additional Protocol, Australia akhirnya mau untuk menegosiasikan terkait ekspor impor uranium dengan India, yang menguntungkan kedua belah pihak.[59]

Oleh karenanya, untuk memenuhi segala kebutuhan India terkait energi itu sendiri, India membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Namun, sebagai negara yang tidak meratifikasi NPT menjadi susah bagi India untuk bekerjasama dengan negara lain utamanya terkait nuklir. Melalui ratifikasi Additional Protocol memberikan jalan baru bagi India untuk diakui sebagai negara dengan kepemilikan nuklir yang bertanggung jawab, juga membuka kesempatan bagi India untuk bekerjasama dengan banyak negara demi pemenuhan kepentingan pengembangan nuklir India.

Simpulan

Dari penelitian ini, dapat diambil beberapa poin untuk menyimpulkannya. *Pertama,* terkait alasan sebuah negara untuk bergabung ke dalam rezim internasional. Melalui penelitian yang penulis lakukan, sesuai dengan teori *systemic constraints analysis*, alasan bergabungnya sebuah negara dikarenakan dua faktor yaitu *constraints* atau paksaan dan *incemtives* atau dorongan. Paksaan ini dijelaskan sebagai situasi ketika pilihan aktor dibatasi sedemikian rupa oleh aktor lainnya dikarenakan power yang lebih besar. Sedangkan dorongan dijelaskan sebagai situasi ketika terdapat faktor-faktor lain yang membuat aktor mengambil keputusan tersebut, entah berupa sistem internasional, perjanjian untuk bekerjasama, jaminan bahwa pihak lain tidak akan merugikan, ataupun hal lain yang memberikan keuntungan pada aktor tersebut di kemudian hari.

Kedua, faktor *constraints* yang menjadi latar belakang India melakukan ratifikasi terhadap Additional Protocol IAEA tahun 2008 adalah *Joint Statement* India dan Amerika Serikat yang dilakukan tiga tahun sebelumnya. Dimana dalam *Joint Statement* tersebut India diharuskan untuk meratifikasi Additional Protocol sebagai bukti bahwa India merupakan negara yang bertanggung jawab walaupun memiliki senjata nuklir. *Ketiga,* faktor *incentives* yang menjadi latar belakang India meratifikasi Additional Protocol adalah keuntungan yang didapatkan India di kemudian hari. Keuntungan ini berupa meningkatnya kepercayaan internasional terhadap India dan juga membuka peluang kerjasama India dengan negara lain yang selama ini sempat terhambat dikarenakan India yang tidak meratifikasi NPT. Melalui ratifikasi Additional Protocol, India diakui sebagai negara pemilik senjata nuklir yang bertanggung jawab dan mendukung pelucutan dan penghapusan senjata nuklir global. *Keempat,* apabila ditarik sebuah benang merah, maka kedua faktor yang menjadi latar belakang India meratifikasi Additional Protocol tersebut pada akhirnya bermuara pada pemenuhan kepentingan nasional, utamanya dibidang keamanan nasional dan juga prestise.

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa. melalui ratifikasi Additional Protocol yang dilakukan oleh India, maka secara tidak langsung India diakui keberadaan dan kepemilikan senjata nuklirnya dalam kancah internasional. Hal ini memudahkan India untuk tetap mempertahankan proliferasi nuklirnya di tengah rezim non-proliferasi yang tersebar secara global. Ketika India dapat mempertahankan pengembangan proliferasi nuklirnya, maka India dapat menjaga keamanan nasionalnya. Selain itu, melalui ratifikasi Additional Protocol ini, prestise India mengalami peningkatan yang berdampak pula pada meningkatnya kepercayaan internasional. Meningkatnya prestise dan kepercayaan internasional ini kemudian berdampak pada semakin banyaknya negara yang mau menjalin kerjasama dengan India. Dengan demikian

[59] *Ibid*

kebutuhan India terhadap bahan bakar untuk pemenuhan energi negaranya dapat terwujud melalui kerjasama tersebut. Menurut penulis, ini merupakan sebuah langkah yang cerdik dikarenakan di satu sisi, India tetap bisa mengembangkan proliferasi nuklirnya. Di sisi lainnya, India berhasil mendapatkan prestise dan memperbaiki citra negaranya dalam skala internasional. Sehingga, baik faktor *constraints* dan *incentives* yang menjadi latar belakang India meratifikasi Additional Protocol ini akhirnya dapat dikatakan memberikan keuntungan bagi India dan juga menjadi sebuah upaya pemenuhan kepentingan nasional India itu sendiri.

Daftar Pustaka

Artikel Daring

Aabha Dixit. "India's Additional Protocol Enters into Force". IAEA [daring]. Dalam http://iaea.org [diakses pada 28 Februari 2017], 2014.

Artileri. "Primadona Pasar Militer Global India' [daring]. dalam http://artileri.org [diakses pada Mei 2017], 2012

Bhattacharjee, Kallol. "India will never sign NPT, says Sushma Swaraj" [daring] dalam http://thehindu.com [diakses pada Maret 2017], 2016

C, Debu. "India's Bid for NSG" [daring]. dalam http://www.mapsofindia.com/my-india/government/what-is-nsg-and-why-india-is-seeking-its-membership [diakses Juni 2017], 2016

International Panel on Fissile Materials. "India Ratifies an Additional Protocol and Will Safeguard Two More Nuclear Power Reactors" [daring].diakses pada 10 Maret 2017, 2014.

The Economist. "India Ratifies, At Last, A Nuclear Deal with the IAEA" dalam*India's Nuclear Diplomacy* [daring]. dalamhttp://www.economist.com/news/asia/21605961-india-ratifies-last-nuclear-deal-iaea-late-addition [diakses pada November 2016], 2014.

The Hindu. "India Crosses A Nuclear Hurdle with NSG Waiver" dalam *The Hindu Business Line* [daring]. dalam http://www.thehindubusinessline.com/todays-paper/india-crosses-a-nuclear-hurdle-with- [diakses pada Juni 2017], 2008.

The Indian Express. "Nuclear Deal: India to Ratify Additional Protocol to Indian Specific Safeguard Agreement" [daring]. diakses pada 10 Maret 2017, 2014.

United Press International, Inc. "Canada tells India: Sign Nuclear Treaty" [daring]. dalamhttp://upi.com [diakses pada April 2017], 1996.

Buku

Cohen, Stephen dan Dasgupta, Sunil. "The Reluctant of Nuclear Power" dalam*Arming Without Aiming: India's Military Modernization*. Massachusetts: The Brooking Institutes, 2010.

Keohanne, Robert O. *The Demand for International Regimes* dalam "International Regines", 1982.

O'Neill, Barry. "Nuclear Weapons and National Prestige". Department of Political Science. Bon University, 2003.

Perkovich, George. *India's Nuclear Bomb: The Impact on Global Proliferation*. California: University of California Press, t.t.

Udgaonkar, B.M. *India's Nuclear Capability, Her Security Concerns and the Recent Tests*. India: Indian Academy of Sciences, 1999.

Dokumen Pemerintah

White House Press Release. "Joint Statement by President George W.Bush and Prime Minister Manmohan Singh". Office of the Press Secretary. Washington DC, 2005.

Dokumen Lembaga Non-Pemerintah

Arms Control Association. "India's Draft Nuclear Doctrine" [daring].dalam http://armscontrol.org [diakses pada Juni 2017], t.t.

IAEA. *Additional Protocol* [online]. dalamhttp://iaea.org [diakses pada Maret 2017], t.t.

NTI. "Implementation of the India-US Joint Statement of July 18, 2005: India's Separation Plan"[pdf].Dalam http://nti.org [diakses pada Maret 2017], 2005.

United Nations. "NPT Treaty" [pdf]. Dalam http://un.org [diakses pada Maret 2017].

Jurnal dan Laporan Penelitian

Aneja, Atul. "India Ratifies Additional Protocol, Decks Cleared for Nuclear Imports", 2014.

Danda, Shures. *Nuclear Weapon Programmes of India and Pakistan: A Comparative Assesment* dalam South Asian Survey, 2010.

Das, Runa. "State, Identity and Representations of Nuclear (In) Securities in India and Pakistan". dalam*Journal of Asian and African Studies*, 2010.

Hirsch, Theodore. "The IAEA Additional Protocol: Why It Is and Why It Matters"dalam *The Nonproliferation Review Fall-Winter*, 2004.

Meyer, John W. *The Changing Cultural Content of The Nation State* [pdf]. Dalam http://jstor.org [diakses pada Juni 2017], 1999.

Rajagopalan, Rajesh. *India's Nuclear Policy*. India: Jawaharlal Nehru University, 2009.

Sethna, HN. "India's Atomic Energi Programme—Past And Future"[pdf]. Dalam http://iaea.org [diakses Maret 2017], 2015.

Weiss, Leonard. "India and the NPT" dalam *Strategic Analysis* Vol/ 34, No. 2, 2010.